

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Jalilah^{1*}, Nashrullah², Maimun³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh
jalilah@ar-raniry.ac.id, nasrull2001@gmail.com, maimun@ar-raniry.ac.id,

ABSTRACT

One of the major economic issues that remains a significant challenge for Indonesia is poverty, which directly impacts the welfare of the population. The government has made various efforts to address this issue, one of which is through the Family Hope Program (PKH). This program is designed to assist impoverished communities by providing conditional cash assistance aimed at improving access to education, health, and basic needs. However, ensuring transparency and accuracy in the implementation of social assistance programs, such as PKH, can create a positive impact on community welfare. This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) in improving welfare in Sukamakmur Subdistrict, Aceh Besar District. Using a qualitative approach, the research employs interviews and observations conducted in Gampong Tampok Blang, Gampong Lamteh Dayah, and Gampong Tampok Jeurat Raya. The findings indicate that overall, the distribution of PKH, reviewed from the indicators of targeting accuracy, adequacy, utilization, and timeliness, has positively contributed to community welfare.

Keywords: Family Hope Program, Community Welfare

ABSTRAK

Salah satu masalah ekonomi utama yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia hingga kini adalah kemiskinan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin dengan memberikan bantuan bersyarat yang bertujuan meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, memastikan transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi di Gampong Tampok Blang, Gampong Lamteh Dayah, dan Gampong Tampok Jeurat Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan penyaluran PKH, ditinjau dari indikator tepat sasaran, jumlah, pemanfaatan, dan waktu, telah memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu isu fundamental yang terus menjadi perhatian di berbagai lapisan masyarakat. Kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga masalah kesejahteraan manusia. Ketika seseorang hidup dalam kemiskinan, ia sering kali

menghadapi keterbatasan akses terhadap hal-hal penting, baik itu akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Individu yang hidup dalam kemiskinan sering kali menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang berdampak pada kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam hal ini, Ilmu-ilmu sosial menyoroti bahwa mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkisar pada lima bidang utama: kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial. Kesejahteraan melibatkan upaya pemerintah untuk memberikan layanan sosial di bidang-bidang ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kesejahteraan. Selain itu, tanggung jawab masyarakat terhadap individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial ditekankan dalam kesejahteraan sosial (Notowidagdo, 2020).

Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu menjaga dirinya sendiri sesuai dengan standar kehidupan yang berlaku dalam kelompoknya dan tidak bisa memanfaatkan kemampuan mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Suparlan, 2021: 12). Menurut sejarah, ketimpangan antara kaya dan miskin tidak dianggap sebagai masalah sosial hingga perdagangan berkembang pesat. Dengan meluasnya perdagangan global, muncul nilai-nilai sosial baru dan standar kehidupan tertentu yang diadopsi sebagai kebiasaan masyarakat. Hal ini kemudian menyoroti perbedaan ekonomi antara individu dan kelompok, menjadikannya isu sosial yang signifikan (Sukirno, 2020: 34).

Berbagai upaya telah dilakukan, berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan, dan sejumlah besar sumber daya telah digunakan dalam upaya memerangi kemiskinan. Beberapa studi penelitian dan penilaian telah dilakukan di institusi akademik, hotel kelas atas, dan tempat lainnya. Namun pertanyaannya adalah mengapa kemiskinan masih terus terjadi di masyarakat kita saat ini. Meskipun ada tantangan yang melekat dalam pengentasan kemiskinan, diskusi dan perencanaan aksi harus terus dilakukan. Untuk membuka jalan menuju kesejahteraan, pemahaman kita terhadap konsep dan strategi pengentasan kemiskinan harus terus ditingkatkan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi dengan memberikan akses yang lebih baik kepada keluarga miskin terhadap layanan dasar. PKH merupakan skema kesejahteraan sosial yang memberikan bantuan keuangan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Penerima dari keluarga tersebut harus mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk menerima bantuan (www.kemsos.go.id).

Program PKH ini telah ada sejak tahun 2007, di mana PKH ini tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini (Dirjen Linjamsos, 2017).

Bentuk upaya meningkatkan efektifitas penganggulan kemiskinan di bidang perlindungan sosial. Peraturan tersebut di atur dalam Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa "Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Dapat diartikan secara luas bahwa, apapun yang mencakup perlindungan sosial itu dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama pada kelompok miskin, serta untuk meningkatkan hak-hak kelompok di setiap masyarakat dan juga meningkatkan status sosial disetiap masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan langsung tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin di Indonesia. PKH berfungsi sebagai salah satu program manfaat bagi masyarakat miskin agar terhindar dari kondisi krisis, PKH dalam jangka panjang diharapkan bisa memutuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan dan kesehatan. Dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam keluarga penerima manfaat (KPM) ada kesempatan kerja yang lebih luas dan terbuka bagi anak dari penerima program keluarga harapan (PKH) di masa depan, dengan demikian generasi berikutnya agar dapat keluar dari lingkungan kemiskinan.

Fungsi kesejahteraan sosial dalam pencegahan masalah sosial adalah untuk mendorong individu, keluarga, dan masyarakat agar berupaya menghindari masalah yang berdampak pada kehidupan, seperti kemiskinan, kekerasan, trauma, dan penyimpangan sosial. Selain itu, kesejahteraan sosial juga berfungsi untuk penyembuhan, terutama ketika individu, keluarga, atau masyarakat mengalami ketidakmampuan fisik, emosional, atau sosial dalam menghadapi masalah dalam kehidupan mereka. Dalam kondisi ini, kesejahteraan sosial hadir dengan menerapkan metode dan teknik yang bertujuan untuk memberikan perubahan dan pemulihan. Kesejahteraan sosial juga berperan dalam pengembangan dan pengorganisasian masyarakat untuk menciptakan kondisi yang lebih baik.

Adapun program PKH ini telah dilakukan di berbagai daerah yang di Indonesia termasuk di Kabupaten Aceh Besar yang telah dilakukan sejak tahun 2013 sampai saat ini. Salah satu kecamatan yang menerima program PKH adalah Kecamatan Sukamakmur, data

jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari tahun 2019-2023 di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar berjumlah 680 KK yang mendapatkan PKH. Perkembangan kemiskinan di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar jika dilihat dari data BPS, berikut tabel angka kemiskinan di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar tahun 2023:

Tabel 1. Angka Kemiskinan di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar 5 tahun terakhir

Variabel Kemiskinan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	58,90	59,70	60,26	58,18	58,94
P1 (Indeks Keparahan Kemiskinan)	0,69	0,61	0,58	0,58	0,43
Garis Kemiskinan (Rp/Bln)	447.563	477.938	489.498	519.320	564.431
Persentase Indeks Keparahan (P1)					

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Aceh Besar 2024

Berdasarkan data BPS pada Tabel 1 menunjukkan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2023 yakni 58.94 KK, ini termasuk angka yang besar bila melihat jumlah keseluruhan yakni 16.754 jiwa. Yang paling menonjol dari data ini adalah penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) yang signifikan pada tahun 2023, menandakan adanya perbaikan dalam kondisi kesejahteraan bagi orang-orang yang masih dalam kategori miskin.

Selain itu, jumlah penduduk miskin yang kembali meningkat pada tahun 2023 setelah penurunan pada tahun 2022 menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah orang yang jatuh kembali ke dalam kemiskinan, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti ekonomi makro dan dampak pandemi. Peningkatan garis kemiskinan yang konsisten setiap tahun mencerminkan peningkatan biaya hidup yang harus dihadapi oleh masyarakat.

Data ini menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada penurunan tingkat keparahan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, program PKH yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Aceh Besar memiliki urgensi yang tinggi. Program ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, khususnya di Kecamatan Sukamakmur. Program PKH merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Implikasi positif dari PKH

perlu dibuktikan secara empiris, sehingga pengembangan program ini memiliki bukti nyata yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa PKH memiliki potensi untuk membantu KPM keluar dari lingkaran kemiskinan, meningkatkan konsumsi rumah tangga, serta mendorong pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Seperti penelitian Heru, dkk (2022) menyebutkan bahwa pelaksanaannya program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Jombang terdiri kondisi sosial ekonomi KPM setelah mendapatkan program keluarga harapan (PKH) ini mengalami perubahan baik itu dari segi taraf pendidikan anak-anak penerima manfaat, akses Kesehatan kesehatan dan gizi ibu hamil. Hasil penelitian Julfani dan Putra (2023), juga menunjukkan bahwa program PKH memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat dilihat dari meningkatnya akses Pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan, dan membantu mengurangi beban keluarga.

Namun, dalam penelitian sejumlah tantangan Diaz dan Susiloadi (2023), menjelaskan bahwa dalam penerapannya masih ditemukan beberapa tantangan dalam implementasi PKH, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, rendahnya motivasi KPM untuk mencapai graduasi mandiri. Oleh karena Sinergi antara pemerintah, fasilitator, dan masyarakat juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program dan dampak positifnya terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

2. TINJAUAN TEORITIS

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial (Bansos) bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia *Internasional dengan istilah Conditionl Cash Transfer (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan.

PKH dibentuk untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang diarahkan dalam berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. PKH juga diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Program PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 dengan tujuan dari peraturan PKH, yang *Pertama*, meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima

Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social. *Kedua*, mengurangi beban pengeluaran untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin. *Ketiga*, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta sosial. *Keempat*, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. *Kelima*, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat. Adapun komponen yang terdapat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

a. Pendidikan

Persyaratan yang berkaitan dengan pendidikan diwajibkan kepada peserta PKH untuk dapat memenuhi yakni, kehadiran pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama satu tahun ajaran berlangsung dengan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Apabila dalam keluarga ada terdapat anak berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar maka yang bersangkutan dapat dikenakan persyaratan pendidikan.
2. Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun maka anak peserta PKH harus didaftarkan atau sudah terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/SMP/MTS/SMLB).
3. Jika memiliki anak usia 15-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maka peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.

b. Kesehatan

Peserta atau Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditentukan dalam protocol kesehatan oleh Kementerian Sosial RI, diantaranya sebagai berikut:

1. Anak usia 0-6 tahun terdiri dari anak usia 0-28 hari harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali, anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan, anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A minimal sebanyak dua kali dalam setahun.
2. Ibu hamil dan ibu nifas terdiri dari selama kehamilan ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilannya difasilitas kesehatan sebanyak empat kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali usia 4-6 bulan dua kali pada kehamilan 7-9 bulan.
3. Kesejahteraan Sosial terdiri dari lansia 60 Tahun keatas pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan satuan lanjut usia. Serta penyandang disabilitas berat pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah.

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2023), keberhasilan penyaluran bantuan sosial termasuk PKH dapat dievaluasi berdasarkan empat aspek utama yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Tepat Sasaran

Program PKH menunjukkan keberhasilannya dalam aspek ini dengan melakukan pendekatan yang teliti dan terstruktur dalam menentukan rumah tangga yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Proses ini dimulai dengan survei dan verifikasi yang menyeluruh terhadap data ekonomi dan sosial masyarakat yang berpotensi menerima bantuan. Tim implementasi PKH bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa kriteria pendapatan, kondisi kesehatan, dan status pendidikan setiap keluarga sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penentuan tepat sasaran ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak maksimal bagi mereka yang membutuhkan, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan atau kesalahan alokasi dana.

Setelah identifikasi, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa kondisi penerima manfaat tetap sesuai dengan kriteria PKH. Ini melibatkan pembaruan data secara berkala dan peninjauan ulang terhadap kondisi sosial-ekonomi setiap keluarga penerima manfaat. Dengan melakukan ini, program dapat menyesuaikan dukungan yang diberikan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi penerima manfaat dari waktu ke waktu. Dengan demikian, keberhasilan PKH dalam aspek tepat sasaran tidak hanya tergantung pada proses awal identifikasi, tetapi juga pada kemampuan program untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan dalam kehidupan penerima manfaat.

2. Aspek Tepat Jumlah

Keberhasilan penyaluran PKH dalam aspek tepat jumlah tercermin dalam pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan. Penetapan jumlah bantuan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas anggaran yang tersedia menjadi prioritas utama. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan bahwa dana bantuan disalurkan dengan tepat dan tidak melebihi atau kurang dari yang dibutuhkan oleh penerima manfaat. Pengelolaan yang baik ini juga mencakup proses audit yang ketat untuk memeriksa dan memvalidasi penggunaan dana secara akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan mempertahankan standar keuangan yang tinggi, PKH dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam program memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang disasar. Selain itu, pemberian bantuan secara tepat jumlah juga berarti bahwa PKH dapat memberikan jaminan keberlanjutan dan kepastian kepada penerima manfaat. Dengan menetapkan kriteria yang jelas dan prosedur yang transparan dalam penyaluran dana,

program dapat membangun kepercayaan yang kuat di antara masyarakat terhadap tujuan dan manfaat dari PKH. Keberhasilan dalam aspek tepat jumlah juga mencakup pengelolaan yang bijaksana terhadap perubahan dalam kondisi anggaran dan kebutuhan masyarakat, sehingga program dapat tetap relevan dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

3. Aspek Tepat Guna

PKH mencapai keberhasilan dalam aspek tepat guna dengan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya diterima secara pasif, tetapi juga digunakan secara efektif oleh penerima manfaat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam program. Ini melibatkan pendampingan aktif terhadap keluarga penerima manfaat untuk mengelola dan menggunakan bantuan tersebut dengan bijaksana. Misalnya, bantuan PKH yang dialokasikan untuk pendidikan harus digunakan untuk biaya sekolah atau pelatihan keterampilan yang relevan, sementara bantuan kesehatan harus dipergunakan untuk membeli obat atau biaya pelayanan kesehatan yang diperlukan. Pentingnya aspek tepat guna juga terlihat dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas penerima manfaat dalam mengelola keuangan dan sumber daya yang mereka terima dari PKH. Program ini dapat memberikan pelatihan atau pendampingan terkait manajemen keuangan atau pengembangan keterampilan, sehingga penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan dengan cara yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Evaluasi yang berkesinambungan terhadap dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan bantuan juga diperlukan untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya memberikan bantuan materiil, tetapi juga memberdayakan penerima manfaat secara holistik.

4. Aspek Tepat Waktu

Pelaksanaan PKH dengan tepat waktu merupakan faktor krusial dalam menilai keberhasilan program ini. Penyaluran bantuan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah memastikan bahwa bantuan dapat diterima oleh penerima manfaat pada saat yang tepat dan dalam situasi mendesak. Hal ini mencakup penjadwalan yang ketat dalam proses administrasi dan distribusi dana, serta koordinasi yang efisien antara berbagai pihak terkait dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap program PKH. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah mampu menjalankan program dengan disiplin dan ketepatan waktu, hal ini meningkatkan legitimasi dan dukungan terhadap program tersebut. Selain itu, ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan juga memungkinkan penerima manfaat untuk merencanakan penggunaan bantuan dengan lebih efektif, terutama dalam menghadapi situasi keuangan yang tidak pasti atau darurat.

Dengan memperhatikan dan menjaga keberhasilan dalam keempat aspek ini, Program Keluarga Harapan (PKH) dapat terus memberikan dampak positif yang signifikan bagi keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Evaluasi yang berkesinambungan, perbaikan proses, serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini dalam jangka panjang.

Konsep Kesejahteraan

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar mereka dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. UU ini menekankan bahwa kesejahteraan mencakup tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga spiritual dan sosial, menggarisbawahi pentingnya pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan kualitas hidup untuk semua lapisan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Peraturan ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan bahwa semua warga negara, terutama yang paling rentan, memiliki akses ke layanan dan bantuan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini mencakup berbagai program dan inisiatif yang dirancang untuk memberikan perlindungan sosial dan pemberdayaan kepada masyarakat.

Pengukuran kesejahteraan dapat diukur dengan memastikan pemerataan pendapatan, menyediakan akses yang mudah terhadap pendidikan, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus memastikan akses yang merata bagi semua orang. Distribusi pendapatan sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor seperti lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta variabel ekonomi lainnya. Pentingnya untuk memiliki lapangan kerja dan peluang bisnis sehingga setiap individu dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Konsep kesejahteraan telah berkembang menjadi lebih luas dibandingkan sekadar mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan mencakup standar hidup, kesejahteraan (well-being), dan kualitas hidup (quality of life). Menurut Brudeseth (2019), konsep kesejahteraan mencakup kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk menilai kondisi anggota masyarakat dalam meningkatkan keseimbangan hidup. Kesejahteraan ini terdiri dari beberapa aspek utama: kesejahteraan emosi, kesejahteraan materi, kesejahteraan keamanan, dan bermasyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara

berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan yang holistik dan berkelanjutan. Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan: (Bintarto, 2019: 94).

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.

Perspektif spiritual juga mencakup aspek adaptasi moral, etika, dan harmonis, yang berkontribusi terhadap kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam pemeriksaan struktur ekonomi keluarga, keinginan terhadap barang-barang strategis digunakan sebagai indikasi kesejahteraan. Persentase pengeluaran untuk makanan juga merupakan ukuran kesejahteraan. Kesejahteraan mewakili kualitas hidup manusia, menandakan keadaan di mana kebutuhan-kebutuhan esensial terpenuhi dan nilai-nilai kehidupan diaktualisasikan. Kesejahteraan sosial dan kesehatan keluarga memainkan peran penting dalam membina individu untuk tumbuh dan berkembang secara efektif.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui sumber data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini hanya difokuskan pada 3 lokasi di Kecamatan Sukamakmur yaitu Gampong Tampok Blang, Gampong Lamteh Dayah, Gampong Tampok Jeurat Raya. Lokasi ini penulis pilih karena menurut pantauan penulis masih banyaknya ditemukan kasus kesenjangan kesejahteraan meskipun banyak masyarakatnya yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH), juga menurut pantauan penulis belum ada peneliti sebelumnya yang meneliti lokasi ini.

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui pendekatan deskriptif kualitatif dimana setelah semua data terkumpul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi maka semua data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data ini adalah mendeskripsikan data secara bertahap sesuai dengan pedoman wawancara seperti yang telah tersusun. Hal ini dilakukan agar dapat menggambarkan data yang ada, guna memperoleh hal yang nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Pendeskripsian ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang nyata tentang permasalahan yang ada. Selanjutnya data di analisis secara kualitatif. Analisis dan penyajian yang dilakukan berupa

uraian kalimat yang secara jelas dan logis dengan cara mengaitkan berbagai data. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), Reduksi data yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam jumlah yang sangat banyak dan kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. (Sugiyono, 2010) Peneliti akan merangkum semua data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hal-hal yang penting sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Penyajian Data (*Data Display*), Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya (Sugiyono, 2010). Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian dengan singkat, padat dan jelas.
3. Menarik Kesimpulan / Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*), Tahap penarikan kesimpulan dalam penelitian melibatkan proses akhir dari analisis data yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk memahami makna, pola, atau alur sebab-akibat dari data yang diperoleh. Menurut Miles dan Huberman (2014), analisis data bersifat interaktif dan melibatkan revisi berulang antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik merupakan hasil akhir dari proses ini, disajikan dalam bentuk narasi untuk menyimpulkan temuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial (PERMENSOS) RI No. 1 Tahun 2018, sasaran PKH adalah keluarga dan individu miskin serta rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Program ini mencakup komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Implementasinya melalui tahapan perencanaan, penetapan calon peserta, validasi data, penetapan penerima, penyaluran bantuan, penetapan pendamping, peningkatan kemampuan penerima, verifikasi komitmen, pemutakhiran data, dan transformasi kepesertaan. Bantuan PKH terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen. Bantuan Tetap diberikan kepada setiap keluarga dengan jumlah tertentu per tahun, sementara Bantuan Komponen diberikan berdasarkan jumlah anggota

keluarga dan kategori penerima. Bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi masing-masing keluarga.

Di Kabupaten Aceh Besar, bantuan PKH menunjukkan variasi dalam jumlahnya, yang ditentukan oleh tim PKH dan bervariasi mulai dari nilai tertentu per Kepala Keluarga (KK) hingga jumlah tertentu per KK. Hal ini mencerminkan pendekatan yang beragam dan disesuaikan untuk memberikan dukungan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada tahun 2024, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Aceh Besar adalah 14.984 orang, setelah mengalami penurunan sejumlah 429 KPM dari tahun sebelumnya karena kesadaran diri sebagian penerima manfaat yang merasa sudah mampu atau tidak layak lagi menerima bantuan pemerintah. Di Kecamatan Sukamakmur, jumlah KPM adalah 1.302 orang, mengalami penurunan sebanyak 15 orang dari tahun sebelumnya. Bantuan PKH diberikan langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat melalui PT Pos Indonesia, tergantung pada komponen yang mereka terima, dengan adanya komponen ibu hamil, balita, anak SD, anak SMP, anak SMA, dan penyandang disabilitas berat.

Untuk mengukur kesesuaian penyaluran bantuan sosial seperti PKH, peneliti dalam hal ini mengkaji penelitian ini melalui 4T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Guna, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu. Dengan memperhatikan empat aspek ini secara komprehensif, program bantuan sosial seperti PKH diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Aspek Tepat Sasaran

Tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, seperti PKH, mengacu pada proses identifikasi dan seleksi penerima bantuan yang tepat. Ini melibatkan penggunaan kriteria yang jelas dan terukur untuk menentukan keluarga atau individu mana yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Misalnya, dalam PKH, kriteria sasaran bisa termasuk tingkat pendapatan rendah, keberadaan anak usia sekolah yang perlu didukung pendidikannya, atau kondisi sosial-ekonomi lainnya yang menunjukkan bahwa keluarga tersebut membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Pentingnya tepat sasaran adalah untuk memastikan bahwa bantuan dialokasikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan penerima.

Berdasarkan hasil wawancara terkait aspek tepat sasaran yang dilakukan dengan informan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan PKH di Kecamatan Sukamakmur dari tiga sampel Gampong yang berbeda yaitu Gampong Tampok Blang, Gampong Lamteh

Dayah, dan Gampong Tampok, dapat diperoleh pemahaman tentang bagaimana informan mengetahui mereka menjadi penerima manfaat PKH, dan informasi ini diperoleh dari berbagai sumber, informasi dari tetangga dan verifikasi di kantor kelurahan, informasi dari sekolah dan petugas kesehatan, kunjungan petugas sosial dan pemerintah desa, serta pengumuman secara umum.

Semua responden setuju bahwa penerima PKH telah tepat sasaran dan membantu keluarga yang benar-benar membutuhkan, informasi ini diperoleh baik dari penerima bantuan PKH maupun hasil wawancara dengan masyarakat maupun tetangga penerima bantuan PKH. Masyarakat menekankan pengamatan langsung terhadap kondisi ekonomi penerima di sekitar mereka, di mana bantuan ini dapat mendukung dan membantu ekonomi penerima, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan maupun kesehatan. Masyarakat penerima juga merasa sangat terbantu dengan adanya PKH ini, yang memberikan dampak positif dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Dukungan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan rasa optimisme bagi keluarga penerima dalam menghadapi tantangan keseharian. Hal ini menunjukkan bahwa program PKH memiliki peran yang signifikan dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya penyaluran PKH ini juga tidak terlepas dari Namun, dalam pelaksanaannya, penyaluran PKH ini juga tidak terlepas dari kecurigaan masyarakat yang menganggap bahwa penerima PKH tidak tepat sasaran. Padahal, berdasarkan evaluasi dan data yang tersedia, penyaluran PKH telah dilakukan dengan tepat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kecurigaan tersebut sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses seleksi dan penentuan penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan transparansi informasi mengenai mekanisme penyaluran bantuan agar masyarakat dapat memahami bahwa program ini telah dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan. Dengan demikian, persepsi negatif dapat diminimalisir, dan kepercayaan masyarakat terhadap program PKH dapat meningkat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2022) menyebutkan bahwa bantuan sosial yang tepat sasaran adalah krusial karena memastikan alokasi dana hanya kepada individu atau keluarga yang membutuhkan, mengurangi risiko penyalahgunaan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menjamin keadilan sosial dan kredibilitas program. Dengan memastikan bantuan diberikan kepada yang memenuhi syarat, program dapat lebih mudah dievaluasi dan dampaknya diukur, sementara juga memberikan dukungan yang lebih besar dari publik.

Aspek Tepat Jumlah

Tepat jumlah berkaitan dengan pengalokasian bantuan dalam jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan riil penerima. Ini melibatkan penentuan besaran bantuan yang memadai untuk membantu penerima mencapai tujuan yang diharapkan dari program tersebut, seperti memenuhi kebutuhan makanan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya. Dalam konteks PKH, besaran bantuan yang diberikan harus mencukupi untuk mengurangi beban keuangan keluarga penerima, namun tidak berlebihan sehingga dapat menyebabkan ketergantungan atau penggunaan yang tidak efisien. Pengelolaan tepat jumlah ini penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima bantuan. Wawancara terkait aspek tepat jumlah menjelaskan terkait pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman individu dalam menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Sukamakmur serta memverifikasi apakah jumlah yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pertanyaan tersebut juga bertujuan untuk mengetahui apakah ada fluktuasi atau perubahan dalam jumlah bantuan PKH selama periode penerimaan, atau apakah jumlah tersebut tetap konsisten setiap tahun.

Perlu diketahui, PKH merupakan program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan ketentuan jumlah yang telah ditetapkan secara resmi. Program ini hanya diberikan kepada keluarga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi syarat sebagai penerima PKH sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pada tahun 2021, bantuan yang diberikan kepada penerima PKH telah diatur dengan detail sebagai berikut:

1. Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
2. Anak usia dini : Rp. 2.400.000,-
3. SD : Rp. 900.000,-
4. SMP : Rp. 1.500.000,-
5. SMA : Rp. 2.000.000,-
6. Disabilitas : Rp. 2.400.000,-
7. Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

Hasil wawancara terkait aspek tepat jumlah dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukamakmur menunjukkan bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara konsisten sesuai dengan ketentuan pemerintah. Para informan dari berbagai gampong, seperti Tampok Blang, Lamteh Dayah, dan Tampok Jeurat Raya, menyatakan bahwa bantuan PKH yang mereka terima tidak pernah mengalami perubahan atau penyimpangan dari ketentuan yang ada. Misalnya, responden dari Gampong Tampok Blang menyatakan bahwa bantuan untuk anak di SMA selalu stabil

sebesar Rp2.000.000 per tahun. Begitu juga responden dari Gampong Lamteh Dayah dan Gampong Tampok Jeurat Raya juga mengkonfirmasi konsistensi tersebut. Upaya yang dilakukan oleh KPM untuk memastikan kesesuaian jumlah bantuan PKH juga beragam, seperti pengecekan bukti pembayaran, diskusi dengan tetangga atau anggota keluarga, serta membandingkan informasi dengan publikasi pemerintah setempat. Hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi PKH pada 3 desa di Kecamatan Sukamakmur telah efektif dalam menyalurkan bantuan dengan jumlah yang tepat, sementara prosedur pengecekan dan pengawasan yang dilakukan oleh penerima manfaat juga berjalan baik, memberikan manfaat maksimal bagi keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Bantuan ini juga konsisten diberikan setiap tahunnya dan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan penerima PKH, baik dari segi meningkatnya akses Kesehatan, Pendidikan anggota keluarga serta membantu beban pengeluaran kebutuhan sehari-hari keluarga peserta PKH. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH di Gampong Tampok Blang, Gampong Lamteh Dayah, dan Gampong Tampok Kecamatan Sukamakmur telah efektif, terutama dalam menyalurkan bantuan dengan jumlah yang tepat. Tidak adanya laporan tentang ketidaksesuaian jumlah bantuan menunjukkan bahwa prosedur pengecekan dan pengawasan yang dilakukan oleh penerima manfaat juga berjalan dengan baik.

Lestari dan Sari (2023) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa penting untuk memastikan bahwa penyaluran dana sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan untuk menjaga keadilan, kepercayaan masyarakat, dan integritas program. Di samping itu, bantuan sosial tidak disalurkan sesuai jumlahnya, akan menimbulkan berbagai risiko seperti ketidakadilan, penyalahgunaan dana, ketidakstabilan keuangan bagi penerima manfaat, kemacetan administrasi, dan memicu terjadinya tindak korupsi yang dilakukan oknum tertentu.

Aspek Tepat Guna

Tepat guna merujuk pada penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia untuk program bantuan sosial dengan cara yang efisien dan efektif. Ini mencakup manajemen administrasi yang baik, transparansi dalam penggunaan anggaran, dan evaluasi yang terus-menerus terhadap hasil dan dampak program. Dalam PKH, tepat guna berarti bahwa setiap dolar yang diinvestasikan dalam program tersebut digunakan untuk memberikan manfaat maksimal bagi penerima bantuan, tanpa pemborosan atau penyalahgunaan. Evaluasi secara teratur terhadap keberhasilan program dapat membantu mengidentifikasi area perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan keberlanjutan program bantuan sosial.

Hasil wawancara tentang aspek tepat guna dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar, menggambarkan keberhasilan program dalam mencapai tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Dana PKH digunakan secara proporsional untuk kebutuhan pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Prioritas pada pendidikan dan kesehatan tercermin dalam alokasi dana yang signifikan untuk biaya sekolah, pembelian buku pelajaran, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Analisis perbedaan kondisi ekonomi sebelum dan setelah menerima bantuan PKH menunjukkan peningkatan dalam hal kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, terutama terkait dengan stabilisasi pengeluaran, dan perbaikan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Ini menandakan bahwa bantuan PKH efektif dalam memberikan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat di wilayah tersebut.

Para penerima bantuan memprioritaskan alokasi dana untuk biaya pendidikan, termasuk pembayaran uang sekolah, pembelian buku pelajaran, dan seragam sekolah, yang merupakan elemen penting dalam menunjang proses belajar anak-anak mereka. Namun, terdapat informan yang ternyata juga tidak sepenuhnya mengalokasikan dana PKH sesuai yang seharusnya karena adanya tuntutan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi. Namun demikian secara umum, seluruh informan telah menyatakan bahwa bantuan PKH telah tepat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi keluarga mereka. Bantuan ini tidak hanya membantu meringankan beban finansial, tetapi juga membuka peluang bagi anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Meskipun ada beberapa penerima yang terpaksa menggunakan sebagian dana untuk kebutuhan sehari-hari di luar alokasi yang direncanakan, hal ini mencerminkan realitas bahwa banyak keluarga menghadapi tekanan ekonomi yang mendesak. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa dana bantuan digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan program. Secara keseluruhan, PKH telah memberikan dampak positif, baik dalam aspek pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok, maupun peningkatan kualitas hidup penerima. Dengan pengelolaan yang lebih baik dan evaluasi yang berkelanjutan, program ini diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam penelitian Indrawati (2022), disebutkan bahwa saat ini di Indonesia, fenomena ketidaktepatan guna masih sering terjadi dalam penyaluran dana bantuan sosial menjadi perhatian utama. Masalah tersebut meliputi ketidakakuratan data dan keterbatasan sumber daya manusia. Dampaknya sangat merugikan, terutama bagi masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Namun, pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi

masalah tersebut melalui peningkatan pengawasan, transparansi, dan penguatan sistem pelaporan.

Aspek Tepat Waktu

Tepat waktu dalam penyaluran bantuan sosial menekankan pentingnya proses penyaluran yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Ini meliputi proses aplikasi yang efisien, verifikasi yang cepat terhadap data penerima, dan penyaluran dana atau bantuan kepada penerima dalam waktu yang sesuai dengan kebutuhan mendesak mereka. Dalam konteks PKH, keterlambatan dalam penyaluran bantuan dapat berdampak negatif pada kebutuhan sehari-hari penerima, seperti memenuhi kebutuhan nutrisi, pendidikan anak, atau akses layanan kesehatan yang diperlukan secara mendesak. Konsistensi dalam penyaluran tepat waktu adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar memberikan manfaat langsung bagi mereka yang membutuhkannya.

Berdasarkan hasil wawancara terkait aspek tepat waktu dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar, dapat ditemukan bahwa implementasi program PKH berhasil dalam mematuhi jadwal penyaluran dana sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Mayoritas penerima manfaat menerima dana sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sesuai pendapat dari berbagai informan dari Gampong Tampok Blang, Lamteh Dayah, dan Tampok Jeurat Raya. Beberapa informan mengonfirmasi bahwa mereka menerima dana PKH secara teratur setiap tiga bulan, sesuai dengan kategori penerimaan dan jumlah yang telah ditetapkan. Ini mencerminkan kesesuaian penyaluran program PKH terhadap jadwal yang telah ditetapkan, memastikan konsistensi dalam dukungan finansial kepada keluarga penerima manfaat. Selain itu, wawancara juga mengungkap preferensi penerima manfaat terkait waktu pencairan dana bantuan PKH. Mayoritas lebih memilih penyaluran dalam empat tahap setiap tahun karena memberikan kepastian dan fleksibilitas dalam pengaturan keuangan sepanjang tahun. Namun, ada juga yang mendukung penyaluran dalam satu penyaluran langsung setiap tahun, menganggapnya lebih praktis dan mengurangi beban administrasi bulanan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah, terutama Kementerian Sosial Provinsi Aceh, telah berhasil menerapkan sistem penyaluran dana PKH yang efektif dan tepat waktu, memberikan solusi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan individual penerima manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukamakmur.

Menurut Siti (2022), ketepatan waktu dalam penyaluran dana bantuan sosial sangat penting karena memastikan penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan mendesak secara cepat, meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga, mendorong pertumbuhan ekonomi

lokal, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, penyaluran yang tepat waktu juga mengurangi beban administratif bagi lembaga terkait.

Secara keseluruhan berdasarkan 4 indikator yang digunakan untuk mengukur kesesuaian penyaluran bantuan PKH, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran program PKH di 3 desa Kecamatan Sukamakmur yaitu Gampong Tampok Blang, Gampong Lamteh Dayah, dan Gampong Tampok, menunjukkan bahwa penyaluran program telah tepat sasaran sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat penerima, kemudian juga tepat jumlah, tepat guna yaitu dapat membantu meningkatkan akses pendidikan, kesehatan dan membantu pengeluaran sehari-hari serta meningkatkan pendapatan keluarga penerima PKH. Selain itu, penyaluran bantuan PKH juga tepat waktu sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, tentunya penyaluran PKH ini tidak terlepas dari kendala, berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari kalangan Pendamping PKH di Kecamatan Sukamakmur di antara kendala dan hambatan tersebut yaitu seperti kurangnya pendamping sosial, lambatnya pendataan calon KPM baru, dan masalah distribusi Kartu keluarga Sejahtera (KKS). Di sisi lain, hambatan terdiri dari rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat, perubahan kebijakan yang tidak konsisten, opini negatif dan kecurigaan di kalangan penerima manfaat, serta masalah komunikasi dan koordinasi antar lembaga terkait PKH. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan jumlah pendamping sosial, perbaikan pendataan dan distribusi kartu, penyediaan informasi yang lebih jelas, konsistensi kebijakan, dan peningkatan komunikasi dan koordinasi antar lembaga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi PKH, memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi PKH di tiga gampong yang ada di Kecamatan Sukamakmur terbukti mendukung kesejahteraan masyarakat, hal ini dilihat dari aspek tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna, dan tepat waktu. Program PKH berhasil menjangkau keluarga penerima manfaat yang membutuhkan dengan memperhatikan kondisi ekonomi penerima PKH secara langsung. Penyaluran dana dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan pemerintah dan digunakan secara proporsional untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sehari-hari. Selain itu, penyaluran dana dilakukan tepat waktu, memberikan kepastian dan fleksibilitas bagi penerima manfaat. Keberhasilan implementasi PKH ini mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukamakmur. Namun dalam

penerapannya terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam implementasi PKH di Kecamatan Sukamakmur meliputi kurangnya jumlah pendamping sosial, lambatnya pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat baru, dan masalah distribusi Kartu keluarga Sejahtera (KKS). Di sisi lain, hambatan terdiri dari rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat, perubahan kebijakan yang tidak konsisten, opini negatif dan kecurigaan di kalangan penerima manfaat, serta masalah komunikasi dan koordinasi antar lembaga terkait PKH.

Saran

Agar penyaluran bantuan PKH dapat tersalurkan secara lebih efektif dan efisien, maka perlu adanya peningkatan sistem pengelolaan, evaluasi, dan strategi komunikasi yang lebih baik untuk memastikan program dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait baik itu dari pemerintah pusat daerah, dan bank penyalur untuk mempercepat proses distribusi, termasuk perlu adanya tim khusus untuk mendampingi masyarakat penerima manfaat. Sehingga dalam hal ini juga dapat memfasilitasi partisipasi aktif dan pemahaman masyarakat terhadap program PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto. (2019). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dedy, U., Hakim, A., & Ribawanto, H. (2018). *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin, Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(1), 214-219.
- Diaz, Shafira Twinsa dan Susiloadi, Priyanto (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Tahun 2020-2021. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 14 No.1.
- Dirjen Linjamsos. 2017. *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Padang : Kementrian Sosial RI.
- Habibullah. 2011. *Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kerawang*, *Jurnal Informasi*, Vol. 16, No 02.
- Heru, Moch.Widodo, dkk (2022). Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (PKM) Di Kabupaten Jombang, *Jurnal eBA* Vol. 9 No.2.
- Indawati, R. (2022). Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten
- Jalilah, Nashrullah, Maimun** | Analisis Implementasi Program PKH terhadap Kesejahteraan Masyarakat...

- Takalar). *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 24– 41.
- Lestari, A.W.D., & Sari, M.M.K. (2023). Makna Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Yang Adil Dalam Perspektif Masyarakat Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, *JCMS*, 8(2), 65-80.
- Listy Julfani¹, Ilham Mirzaya Putra, (2023), Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Michael, P., Todaro, & dan Smith, S.C. (2020). *Economic Development (terj): Pembangunan Ekonomi*, Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- Parsudi, S. (2013), *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Prathama, R. (2016). *Teori Ekonomi Mikro*, Edisi ketiga, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia.
- Rohiman, N. (2016). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Amzah.
- Rohiman, Notowidagdo (2016). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Amzah.
- Rosyidi, S. (2014). *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Siregar, N.O.Z. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 237-244.
- Siti, N. (2022). Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul*, 2(2), 1–7.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). *Pendampingan sosial Dalam Pengembangan Masyarakat*.
- Sukirno, Sadono (2020). *Mikro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Sunarti, E. (2021). *Kependudukan dan Keluarga Sejahtera*, Bogor: IPB.
- Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No.11 Tahun 2009:12
- UU No. 52 tahun 2009 tentang: Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pasal 1.